

**ANALISIS WACANA BANDUNG JUARA:
Studi Kritis Terhadap Etos Partisipasi Kewarganegaraan Kota Bandung**

(Diterima 21 Maret 2019; direvisi 30 Maret 2019; disetujui 30 April 2019)

Muhammad Yunus Maulana¹

¹ Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung

e-mail: maulanayunus@student.upi.edu

ABSTRAK

Studi kritis yang dikerjakan berfokus pada konformitas pemuda kota Bandung terhadap gagasan partisipasi kewarganegaraan dalam wacana Bandung Juara. Hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki sejauhmana pesan dalam suatu wacana politik dapat dimengerti dan dihabitiasi oleh pemuda kota Bandung. Maka dilakukan riset dengan kombinasi dua metode: (1) analisis wacana kritis terhadap wacana Bandung juara dan wacana yang diproduksi pemuda. Wacana dianalisis dengan menggunakan teknik *semanalysis* dan analisis retorik dalam kerangka wacana politik (van Dijk, 2008); (2) Studi Kritis terhadap realitas pemuda yang ditemukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Melalui kerja dengan pendekatan kritis ini diketahui bahwa: (1) wacana Bandung Juara mengharapkan kualitas partisipasi kewarganegaraan pada level *citizen power* menurut dua aspek yang direpresentasikan. Representasi ini meliputi pengandaian konsensual mengenai partisipasi kewarganegaraan kolaboratif dan cara kerja diskursus Bandung Juara merubah persepsi konstituen kearah tujuan hegemoni secara gradual. (2) Fakta dibalik kenyataan sosial yang merepresentasi etos partisipasi kewarganegaraan pemuda kota Bandung baru berada pada level tokenisme atau non-partisipasi. Situasi semacam ini menuntut terjadinya presisi dalam distribusi *capital* antara suprastruktur dan infrastruktur yang masing-masing memusarkan diri pada pembentukan efektifitas politik.

Kata Kunci : *Partisipasi Kewarganegaraan, Pemuda, Diskursus, Etos*

ABSTRACT

The critical study undertaken focused on the conformity of youth towards the idea of civic participation in the Bandung Juara discourse. This is intended to investigate the extent to which messages in a political discourse can be understood and habituated by the youth. this research is done by combining two methods: (1) critical discourse analysis of Bandung juara and discourse produced by youth. Discourse was analyzed using semanalysis techniques and rhetorical analysis within the framework of political discourse (van Dijk, 2008); (2) Critical study of the reality of youth found through interviews, observation, and documentation studies. Through working with this critical approach it is known that: (1) Bandung juara discourse expects the quality of citizenship participation at the citizen power level according to the two aspects represented. This representation includes consensual suppositions regarding collaborative civic participation and the way in which the Bandung Juara discourse changes constituent perceptions gradually towards the goal of hegemony. (2) The facts behind the social reality that represent the ethos of youth civic participation are only at the level of tokenism or non-participation. This situation demands precision in the distribution of capital between the superstructure and infrastructure, each of which is focused in the formation of political effectiveness.

Keyword: *Civic Participation, Youth, Discourse, and Ethos*

PENDAHULUAN

Wacana erat kaitannya dengan peradaban manusia (Carrnthers & Boucher, 1998), terutama wacana politik. Wacana Bandung Juara hadir sebagai wacana politik dan memenangi kontestasi pemilihan walikota Bandung pada tahun 2013. Hal ini bukan hanya menjadi bukti bahwa wacana Bandung Juara sebagai wacana yang baik, terlebih adalah keberterimaannya dengan mayoritas konstituen merupakan bukti wacana sebagai refleksi kebudayaan yang melekat pada masyarakat kota Bandung. Sehingga mendalami wacana ini diharapkan dapat menjadi upaya alternative untuk menelaah dan mendeskripsikan pandangan masyarakat kota Bandung mengenai politik dan keterlibatan politik, khususnya pada konteks partisipasi kewarganegaraan abad 21 yang penandanya hadir dalam wacana tersebut, yakni konsep kolaborasi. Sehingga keberhasilan wacana Bandung Juara.

Berdasarkan konsepsi *Ladder of Citizen Participation* (Arnstein, 1969) wacana Bandung Juara berupaya mewujudkan kondisi *citizen power* dengan realitas *partnership*—sebagai padanan kata kolaborasi. Sebagaimana yang sering diungkapkan diantaranya adalah, pemerintah beserta aparaturnya (institusi), pelaku dunia usaha atau ekonomi, pelaku media massa, masyarakat dan komunitas, serta

akademisi. RK selalu menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihak-pihak tersebut merupakan kekuatan utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan Bandung Juara. Secara referensial etos kolaborasi dipancarkan oleh Komunitas *Bandung Creative City Forum* (BCCF). Forum lintas komunitas ini memberikan perhatian terhadap isu-isu kota Bandung meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Forum ini berhasil mendorong Ridwan Kamil—sebelumnya ketua BCCF—meraih *urban leadership award* dari *Institute for Urban Research* (Penn IUR), *University of Pennsylvvania* pada tahun 2013. Penghargaan tersebut didapat dari partisipasinya bersama BCCF dalam memberdayakan sebuah kampung narapidana bernama Blok Tempe yang bertempat di Kota Bandung. Hal tersebut adalah faktor penting keberhasilan Ridwan Kamil menjadi walikota Bandung untuk periode tahun 2013-2018 dengan perolehan suara yang relatif besar, 434.130 suara dari 969.647 suara sah (Kamil, 2013). Berdasarkan informasi tersebut saya menyatakan bahwa Ridwan Kamil bersama jaringan partisipatifnya adalah sampel penting realitas partisipasi kewarganegaraan, dimana aktifisme ekstra-politik beririsan dengan dinamisme politik elektoral dan menghasilkan efektifitas politik.

Pada konteks wacana etos partisipasi kewarganegaraan direfleksikan melalui kalimat atau proposisi retoris. Kendatipun tidak dapat dipungkiri etos dapat diselidiki pada jenis proposisi lain. Intinya kita pahami bahwa ada tiga unsur yang berbeda pada tatanan proposisi yakni: *logos* yang merupakan argument yang dinyatakan “mungkin” oleh khalayak; *etos* yang terdiri dari pemahaman pendengar tentang akal sehat pembicara, niat baik terhadap mereka, dan karakter umum; dan *phatos* yang merupakan garis pemikiran yang ‘menempatkan khalayak dalam kerangka berfikir yang benar’ (Kaid, 2015). Wacana merupakan *visible mark* -meminjam istilah Gelb (1953)- dari pemikiran seseorang atau kelompok. Hal nya, proses produksi wacana atau penuangan ide menjadi wacana (teks atau ujaran) -secara psikologis- terdapat keinginan menuangkan ide yang berasal dari *long-term memory*, meliputi: *knowledge of topic*, kemudian perhatian terhadap calon pembacanya, demikian hingga penyusunan kerangka pikiran yang mengantarkan topik persoalan (Carrnthers & Boucher, 1998; Flower & Hayes, 1981). Dimana variable kepribadian yang membentuk partisipasi kewarganegaraan—seperti (1) efikasi diri, kompetensi, dan konsep diri; (2) otoritas dan orientasi nilai; (3) anomia, alienasi, dan *locus of control*; (4) power, *effectance* atau motivasi

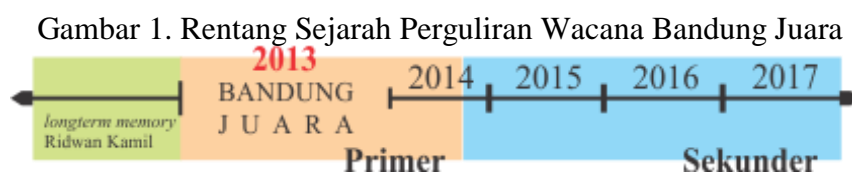
kontrol, serta (5) dogma dan gaya berfikir (lihat, Barnes et al, 1979;. Burn dan Konrad, 1987; Huebner & Lipsey, 1981; Marsh, 1977; Milbrath, 1986; Sears, 1986; Watanabe & Milburn, 1988)—dipresentasikan melalui proposisi dalam wacana. Sampel semacam Ridwan Kamil dan jaringan partisipatifnya sangat dibutuhkan dalam studi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan pada era global yang dinamis. Pasalnya, Studi partisipasi kewarganegaraan pada era konformitas global dihadapkan pada tantangan untuk memproyeksi tatanan partisipasi yang mencerminkan *Three Practices of 21st Century Citizens: understanding* -penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk menginformasikan dan membimbing partisipasi dalam kehidupan sipil; *engagement*-motivasi, disposisi dan kemauan untuk melaksanakan hak kewarganegaraan dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan; dan *action*—cara warga berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan dunia secara lokal, nasional, internasional dan digital (Torney-Purta & Vermeer, 2004; Torney-Purta dkk., 2001).

METODOLOGI

Studi kritis dianggap relevan sebab kajian ini berangkat dari “teori dengan maksud praktis” sebagai kekhasan dari teori kritis (Habermas,

1963; McCarthy, 2011). Sehingga kritik atas etos partisipasi pemuda Kota Bandung dibawah dominasi wacana Bandung Juara akan bertemu dengan kebermaknaan dan kemanfaatannya apabila dilakukan dengan kajian yang bersifat reflektif pada dua sisi: dia sadar-diri akan asal-muasal perkembangan sejarah masyarakat dan dia sadar-diri akan perannya dalam

perkembangan masyarakat lebih lanjut (McCarthy, 2011). Secara garis besar ada dua hal yang perlu diungkap dalam penelitian ini yakni: *pertama*, kandungan dalam Bandung Juara yang dibongkar dengan cara mencermati perguliran wacana dengan rentang sejarah sebagai berikut,



Data Primer merupakan data studi dokumen penelitian yang diperlakukan sebagai entri poin serta basis kognisi yang hendak diselidiki lebih dalam. Sehingga wacana yang dipilih sebagai data primer antara lain:

Tabel 1. Sumber Data Primer: Wacana Bandung Juara

Identitas Wacana			
Judul Wacana	Pewacana	Waktu	Kode
1000 Kata untuk Relawan Bandung	Ridwan Kamil	19/04/2013	A.04.19.2013
Mimpi Ridwan Kamil tentang Pemuda	Ridwan Kamil	28/03/2013	A.03.28.2013
Deklarasi Ridwan Kamil untuk Bandung	Ridwan Kamil	10/03/2013	A.03.10.2013
Cita-Cita Bandung	Tim Kampanye	12/06/2013	B.06.12.2013
Jurus Jitu untuk Bandung Juara	Tim Kampanye	17/06/2013	B.06.17.2013
Si Golput Mencari Cinta	Tim Kampanye	07/06/2013	B.06.07.2013
Sambutan Walikota Bandung pada Acara Peringatan Hari Jadi ke-204 Kota Bandung tahun 2014	Ridwan Kamil	25/09/2014	A.09.25.2014

Sumber data kedua adalah wacana yang pada penelitian ini dibatasi pada pemuda Kota Bandung. Adapun sumber data primer sebagaimana dikelompokan antara lain:

Tabel 2. Sumber Data Primer: Wacana dari Pemuda

Jenis Wacana	Identitas Wacana			
	Judul Wacana	Sumber	Waktu	Kode
Teks	Gerak Pemuda dalam Pembangunan	Sigit Iskandar (Ketua DPD KNPI Kota Bandung)	07/06/2015	C.06.07.2015
	Peran Pemuda Dalam Kehidupan Beragama, Berbudaya, Berbangsa & Bernegara	Hendra Guntara, S.Hum, M.Ud (Bendahara Umum DPD KNPI Kota Bandung)	07/06/2015	C.06.07.2015-II
	Deklarasi BYF	Bandung Youth Forum	17/08/2015	C.08.17.2015
	<i>Bandung as a Gimmick City</i>	M Ryzki Wiryawan (Komunitas Aleut)	22/05/2015	C.05.22.2015
	Komunitas Kreatif Muda di Dasar Piramida	Tb Fiki C Satari (Opini Pikiran Rakyat)	07/12/2016	C. 12.07.2017

Pada tataran wacana penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Teknik retorik dan linguistik pada penelitian ini digunakan dengan sedikit modifikasi pada beberapa terminologi dan kategorinya. Pada tingkat diskursus makro, dilakukan identifikasi strategi yang digunakan dalam pembangunan konstruksi kognitif partisipasi warga Bandung. Mereka mendefinisikan strategi sebagai rencana untuk mencapai tujuan politik, psikologis, atau jenis tujuan tertentu lainnya (Wodak et al. 1999; Ricento, 2003). Strategi ini dirancang untuk membentuk pemikiran dan membujuk auditor/pembaca, dapat juga disebut sebagai

strategi retorik. Adapun strategi tersebut antara lain, *Pertama*, **strategi konstruktif**, yang berusaha membangun identitas ideologis tertentu. Tiga sub kelompok di bawah Strategi Konstruktif adalah: (1) kelompok **strategi membenaran** yang mencoba untuk membenarkan atau merelatifkan status sosial *quo ante*; (2) **strategi unifikasi dan kohesivasi** yang menekankan penyatuan fitur dan inklusi umum; dan (3) **strategi penghindaran** yang menekan perbedaan intra-nasional dan diskontinuitas/gangguan. *Kedua*, **strategi transformasi** yang bertujuan untuk mentransformasikan identitas ideologis yang relatif terbangun dengan baik beserta

komponennya menjadi identitas lain. *Ketiga*, **strategi pelestarian** mengandaikan dan/atau menekankan kontinuitas politik yang positif.

Sub-strategi dalam kategori ini adalah **strategi penghindaran** yang berusaha menekan atau menghindari isu perubahan.

Data sekunder pada penelitian ini adalah hasil pengamatan dan wawancara kepada subjek dengan golongan sebagaimana dimaksudkan antara lain;

Tabel 3. Sumber Data Sekunder

Nama Responden	Golongan	Keterangan
Fajar Setyaning Dwi Putra	BYF	Pendiri Forum Rock and Roll Bandung
Ganjar Darussalam	OKP	Ketua HMI Cabang Bandung
Rizky Isman Kusumah	Komunitas diluar BCCF & BYF	Pendiri Komunitas Kita Indonesia
Muhammad Salman Abidin	Komunitas diluar BCCF & BYF	Member Komunitas Berbagi Nasi & Rotaract Bandung District Bandung Kota Kembang
Agus Setiabudi	KNPI Kota Bandung	Wk. Ketua Bidang Organisasi dan pemberdayaan potensi pemuda, DPD KNPI Kota Bandung
Moh. Ariodillah	KNPI Kota Bandung	Sekretaris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etos Kolaborasi: Analisis Wacana Bandung Juara

Berdasarkan analisis yang dilakukan, gagasan partisipasi kewarganegaraan tersebut banyak ditemukan pada proposisi dengan strategi rekonstruksi. Upaya rekonstruksi dilakukan pewacana secara halus, menggunakan gaya eufimisasi dan litotes untuk menghindari kesan kekuasaan atau kesan politik yang superior. Identifikasi tersebut ditemukan pada strategi pembenaran berkaitan dengan kultur, pengalaman mental, dan emosional konstituen yang tidak serta-merta

setuju dengan gagasan yang diketengahkan. Kebenaran partikular yang menunjukkan konstruksi etos partisipasi kewarganegaraan serta cara kerja diskursus Bandung Juara dalam menggeser persepsi konstituen kearah tujuan hegemoni secara gradual berikutnya dijelaskan secara terinci menurut masing-masing sumber data yang telah dianalisis sebelumnya.

Gagasan kolaborasi berimajinasi tentang bagaimana seluruh elemen masyarakat bekerja sama dan saling mendukung untuk satu tujuan atau fokus permasalahan kota Bandung. Sebagaimana dinyatakan dalam proposisi,

Pada saat kita kecewa kita tidak boleh membisu. Pada saat kita dihinakan kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak. Tapi kini bukan zamannya lagi mengubah dunia itu sendirian, kita perlu bersama-sama, kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu ibarat kunci pintu sebuah rumah yang bernama masyarakat madani atau *civil society*. Kota kita ini bukan tanggungjawab siapa siapa, kota kita adalah tanggungjawab kita sendiri. (A.04.19.2013).

Wacana dengan proposisi retorik tersebut menandakan wacana yang bersifat penekanan terhadap gagasan *civil society*. Proposisi tersebut melakukan repetisi terhadap **kata ganti orang pertama** ‘kita’. Upaya tersebut menandakan kuatnya motivasi pewartana membentuk sebuah komunitas diskursif menurut konstruksi gagasan yang diperikan. Proposisi retorik ini berupaya membangkitkan dimensi intrinsik atau perasaan pewartana. Seperti dalam penggunaan kata ‘kecewa’ dan ‘dihinakan’ yang membangkitkan memori kolektif konsituen pada kesepahaman yang dibuat pada proposisi sebelumnya. Penggunaan kata ganti ‘kita’ merupakan tanda **strategi univikasi** yang dilakukan dengan identifikasi pada kesamaan aspek intrinsik perasaan. Kutipan ini dihadirkan dengan dominasi **modalitas keharusan** yang merujuk pada gagasan partisipasi. RK menggaras konsep kolaborasi yang ditegaskan dengan metafora ‘kunci pintu’ dan ‘rumah’ untuk konsep ‘*civil*

society’. Proposisi tersebut dapat dimaknai bahwa *civil society* dapat terwujud jika—dan hanya jika, dilakukan dengan cara-cara kolaboratif. **Strategi konstruktif** untuk tujuan penyatuan ini secara tidak langsung melakukan upaya penghindaran terhadap stigma individualistik dan golongan dengan membangkitkan rasa kedaerahan melalui frasa ‘kota kita’. Secara eksplisit proposisi tersebut mencoba menghindari hadirnya identitas lain selain identitas yang melekat pada diri konsituen utama yakni konsituen sebagai warga kota Bandung. Hal ini pun memberikan dorongan terhadap perasaan memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap suatu hal yang dianggap miliknya.

Berdasarkan konsepsi *Ladder of Citizen Participation* (Arnstein, 1969) wacana Bandung Juara berupaya mewujudkan kondisi *citizen power* dengan realitas *partnership*—sebagai padanan kata kolaborasi. Sebagaimana yang sering diungkapkan diantaranya adalah, pemerintah beserta aparturnya (institusi), pelaku dunia usaha atau ekonomi, pelaku media massa, masyarakat dan komunitas, serta akademisi. RK selalu menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihak-pihak tersebut merupakan kekuatan utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan Bandung Juara.

Akan tetapi ditinjau dari objek referensial yang disajikan, mengacu pada

gagasan *International Association for Public Participation* (2007) tentang *Spectrum of Public Participation*, realitas partisipasi yang dipresentasikan diskursus ini masih berada pada fase *Involve*—kerja langsung dengan masyarakat untuk mendapat masukan langsung dari masyarakat. Sehingga gagasan kolaborasi yang ditawarkan berada pada posisi faktual sebagai tujuan dari strategi transformasi yang diwujudkan melalui jalan partisipasi keterlibatan politik. Lebih terperinci, pewacana memberikan ilustrasi dari gagasan kolaborasi dan ‘*civil society*’ pada kutipan berikut ini,

Blok tempe dua tahun lalu mampu menyelesaikan sendiri masalah banjirnya. Blok tempe mampu mengelola sampah sendiri air sendiri asuransi kesehatan sendiri. Inilah contoh *survival* itu. Di sisi lain anak-anak muda Bandung berkumpul berkelompok, contohnya seperti dalam wadah *Bandung Creative City Forum*. Mereka terus bergerak mencari solusi, mencari gagasan untuk masalah-masalah kota Bandung. Ya kawan-kawan semangat Bandung hari ini adalah semangat *survival* dan kekompakan warganya. Semangat ini adalah energi luar biasa sebuah gotongroyong *par-exelence* dan dunia itu mengamati kita bahkan dunia pun menghargai dengan urban leadership award yang dititipkan kepada saya. Jadi award ini bukan untuk saya tapi award ini adalah untuk semangat Bandung semangat yang menginspirasi dunia (A.04.19.2013).

RK beranggapan bahwa masyarakat Blok Tempe dan BCCF merupakan referensi dari

kolaborasi dan *civil society* tersebut. Dirinya memberikan penekanan berupa **modalitas kenyataan** terhadap kedua objek referensial tersebut dengan menyebut penanda waktu ‘dua tahun lalu’ dan modalitas kenyataan ‘di sisi lain’ yang merujuk pada waktu yang sama. Sehingga didapati bahwa maksud dari ‘bergerak’ sebagai simbolisasi konsep partisipasi kewarganegaraan kurang lebih merujuk pada proposisi yang diperikan serta objek referensial Blok Tempe dan BCCF. Sehingga partisipasi yang dikonstruksi RK selalu berkaitan dengan upaya-upaya kepedulian terhadap masalah disekitar; bersifat solusi, dan diselenggarakan secara kolektif atau kolaborasi. Wacana ini pun tidak ragu untuk membuka diri pada realitas globalisasi atau pergaulan global. Meskipun yang menjadi titik tekan adalah bagaimana kegotongroyongan merupakan nilai kebaikan dari masyarakat Bandung yang dihargai oleh bangsa lain, entitas internasional yang dihadirkan menjadi penanda gagasan partisipasi kewarganegaraan pada konteks globalisasi.

Pada faktanya, *award* sebagaimana disebutkan didapat oleh RK melalui BCCF dalam memberdayakan masyarakat Blok Tempe. Akan tetapi, dengan sangat halus RK memberikan kesan pemisahan antara ketiga entitas tersebut dan menjadi ketaksaan referensial dalam bentuk **eufemisasi**. Upaya

tersebut dilakukan dalam rangka strategi penyatuan dengan membangkitkan rasa memiliki dan menimbulkan kesan rendah hati. Aspek perasaan, nilai, dan emosi, hal-hal yang bersifat intrinsik begitu menjadi prioritas dari wacana ini. Bahkan wacana ini minim sekali proposisi yang konseptual. Hal tersebut menandakan upaya penyatuan kelompok ‘Relawan Bandung’ secara emosional. Hal ini pula yang menandakan adanya upaya-upaya ideologis—kalau tidak disebut sebagai kekerasan simbolik—yang dilakukan melalui wacana. Melalui proposisi demikian, peneliti mendapati kesamaan perasaan dan anggapan antara kontruksi wacana dan konsituen wacana, pada konteks penelitian ini adalah masyarakat kota Bandung.

Didapati bahwa gagasan kolaborasi yang diwacanakan Bandung Juara menempatkan kelompok muda pada subordinasi kekuasaan. Secara harus pemuda kota Bandung—sebagai kelompok, baik sebagai komunitas atau organisasi kepemudaan—sebagai modal sosial dari wacana Bandung Juara. Upaya menampilkan kesan egaliter dan inklusi terhadap permasalahan kota Bandung berpotensi membentuk relasi antar struktur dalam pembentukan habitus kolaborasi. Telaah terhadap aspek *connexion* yang dihadirkan melalauai wacanaa Bandung Juara menjadi

sangat penting untuk keseluruhan studi yang dilakukan, mengingat kajian ini berhubungan erat dengan *field* sebagai salah satu aspek pembentuk tindak sosial (Bourdieu & Waququant, 1992). Dalam hal ini adalah kolaborasi yang digagaskan sebagai partisipasi kewarganegaraan pemuda kota Bandung. Sehingga ruang keterhubungan yang dibuka pemerintah kota Bandung tidak hanya dipandang sebagai upaya keterbukaan pemerintah atau upaya pemerintah hadir di masyarakat. Terlebih berhubungan dengan distribusi kekuatan dari institusi pemerintah bagi publik guna terbentuknya moda partisipasi yang berarti. Kajian atas aspek *connexion* mampu menterjemahkan bentuk-bentuk partisipasi kewarganegaraan pemuda kota Bandung yang sesungguhnya dikehendaki wacana Bandung Juara dibalik gagasan kolaborasi yang diketengahkan.

Terdapat ruang keterhubungan pemuda terhadap pemerintah yang dibuka salah satunya adalah program kartu juara. Kartujuara merupakan ruang keterhubungan tidak langsung atau terwakilkan. Perlu dikritisi bahwa program kartu juara yang dicanangkan mengandung abiguitas. Gagasan “kartu juara” ditujukan kepada dua kalangan, donatur dan warga miskin kota. Donatur dimaksud bisa disebut juga investor. Terdapat proposisi yang menyatakan pada donatur pemegang kartu

juara mendapat akses bertemu walikota dalam pertemuan “tertentu” untuk membicarakan program kota. Sehingga dapat dimaknai para donatur juga memiliki hak untuk menentukan program apa yang akan dieksekusi oleh pemerintah. Sedangkan pada warga miskin hanya untuk mengakses layanan publik. Ambiguitas menunjukkan adanya ketidaksetaraan perlakuan terhadap warga kota Bandung. Mekanisme sensor yang digunakan pada konteks kalimat teridentifikasi pada kata “berkesempatan” secara hiponim pada konteksnya dapat berarti “hak”. Pada konteks kalimat, “hak” adalah hak menentukan program inisiatif warga. Boleh jadi program berjalan berdasar permintaan “donatur” atau “pemegang kartu juara.” Dapat dikatakan program apapun, diajukan oleh warga atau komunitas juga program pemerintah yang tidak didanai APBD dikerjakan atas dasar kesepakatan dengan pemegang kartu juara. Berdasarkan logika tersebut, program yang tidak dikehendaki oleh donatur memiliki kemungkinan realisasi yang sangat kecil. Kartu juara untuk donatur boleh jadi indikasi bentuk baru kolusi yang terbuka dan diupayakan agar disukai masyarakat. Masyarakat lain yang tidak terkategori sebagai ‘donatur’ atau ‘penyumbang’ berada pada posisi subordinasi dari kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah.

Ruang partisipasi langsung menurut wacana Bandung Juara terbuka melalui interaksi aktif RK dalam *cyberspace* dan program ngabandungan. Sebuah studi wacana dengan judul *RK for Mayor: A study of a political figure on Twitter* menyatakan bahwa RK menggunakan twitter sebagai media untuk publikasi rencana kerja, agenda pemerintah, dan pelayanan publik, serta pada waktu bersamaan dirinya mampu memaksimalkan fungsi twitter untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin kota (Iqbal, 2016). Pada masa jabatannya, sosial media pun menjadi salah satu ruang representatif bagi partisipasi warga kota Bandung, termasuk akun media sosial setiap dinas pemerintah kota Bandung diupayakan untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dengan warga (Kamil, 2013).

Pada konteks interaksi pemerintah dan warga negara pun wacana Bandung Juara mengkonstruksi partisipasi kewarganegaraan pada wacana berjudul *Si Golput Mencai Cinta*. Gagasan tersebut adalah ‘ngabandungan’, dimana antara warga kota dan pemerintah saling memperhatikan sehingga terjalin sinergitas kehendak dan keinginan pemerintah dan warga. Ngabandungan sebagai etos merupakan sikap kesediaan dari pemerintah dan masyarakat untuk menyimak secara seksama segala aspirasi dan kehendak baik

pemerintah untuk masyarakat atau masyarakat untuk pemerintah. Tidak berhenti sampai situ, ngabandungan diwujudkan kedalam program pemerintah yang dilakukan oleh setiap dinas. Program ini digelar setiap minggu di setiap kecamatan, dimana unsur masyarakat dan pemerintah hadir dalam forum dialog interaktif.

Terbukanya ruang keterhubungan antar pemuda dengan pemerintah atau otoritas, wacana Bandung Juara menunjukkan imajinasinya tentang *citizen power*, setidaknya pada level *partnership*. Akan tetapi secara eksplisit masih berada pada satu konsentrasi isu mengenai kreatifitas atau ekonomi secara umum. Itu pun ekonomi masyarakat yang bersifat menengah ke bawah yang ditunjukkan dengan pembangunan BCH. Namaun secara mendasar upaya ini masih tampak seperti sebuah *placation*. Dimana masyarakat diyakinkan dengan upaya simbolik tentang keterbukaan dan keterhubungan namun tidak membuka kemungkinan distribusi kekuasaan. Hal ini terindikasi pada proposisi ambigu pada penjelasan mengenai kartu juara. Dimana terdapat kesenjangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa realisasi kartu juara baru dilakukan pada tahun 2017 untuk program bantuan Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Belum sampai menjadi regulasi keterhubungan komunitas dan OKP untuk

mengakses anggaran pemerintah. Bahwa untuk hal program dan pembangunan kepemudaan diimplementasikan dengan cara 'dialas'. Akan tetapi kondisi demikian masalahnya tidak dapat dialamatkan hanya kepada otoritas eksekutif di tingkat kota, ada juga kewenangan yang telah terbagi kepada legislatif yang semuanya seakan-akan telah selesai setelah pemilihan umum. Dengan demikian realitas partisipasi kembali tertumpu pada kapasitas pemuda dalam hidup demokrasi di kota Bandung. Maka perlu identifikasi gagasan mengenai peran pemuda dalam wacana Bandung Juara, peran yang diimajinasikan melalui penanda-penanda kemampuan yang harus dimiliki oleh pemuda kota Bandung.

Etos Partisipasi Kewarganegaraan Pemuda Kota Bandung

Peneliti menegaskan bahwa bagian kedua ini menjelaskan realitas kepemudaan kota Bandung, berikut potensi konfliktual dibalik kenyataan yang menjadi penghambat terwujudnya kolaborasi sebagai etos partisipasi yang ditawarkan wacana Bandung Juara. Mengingat terdapat berbagai simpul partisipasi pemuda di kota Bandung, BCCF saja tidak cukup mewakili kepemudaan di kota Bandung. Setidaknya ada dua jenis partisipasi kepemudaan yang berkembang kota Bandung kepemudaan dengan bentuk komunitas dan

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda keorganisasian yang dasar, perbedaan antara (OKP). Setidaknya menurut aspek keduanya yakni,

Tabel 4. Perbedaan Komunitas dan OKP menurut 6 Aspek Keorganisasian

Aspek	Komunitas	Organisasi
Orientasi	Ekspresi hobby, minat, dan tujuan.	Kaderisasi dengan landasan, visi, dan misi organisasi yang terbentuk menurut dan mengikuti sejarah perkembangannya.
Sifat	Bebas dan tanpa keterikatan. Komunitas cenderung tidak memiliki aturan yang menentukan struktur, sehingga dalam hal kegiatan, komunitas cenderung spontanitas dan tatakelolanya sukarela dengan pengelola yang bergantian.	Sistematis dan terikat aturan. OKP mengatur struktur kepengurusan dan aturan organisasi lainnya yang menentukan proses dalam berkegiatan.
Sistem	Komunitas berorientasi hasil	Organisasi berorientasi proses
Legalitas	Mendapat pengakuan publik, namun tidak memiliki legalitas hukum	Akta notaris, surat domisili, tercatat pada dinas terkaait.
Keanggotaan	Sukarela	Terikat aturan organisasi mengenai status anggota dan prosedur kehilangan status keanggotaan.
Anggaran/ Pendanaan	Optimalisasi potensi anggota atau kolektif	mendapat akses pendanaan pemerintah

Apabila realitas tersebut ditarik kepada konteks politik, tidak semua kelompok pemuda mengikuti konformitas Bandung Juara, tidak juga sebaliknya. Tidak juga kenyataan sosial yang menunjukkan tumbuh suburnya aktifitas kepemudaan di kota Bandung merupakan tanda suburnya partisipasi kewarganegaraan. Begitu pun pandangan supervisial yang diujakan media dan klaim kota layak pemuda tidak dapat menjadi legitimasi akademis dari realitas kota

yang partisipatif. Pada bagian kedua pembahasan ini, sepenggal cerita diatas diperdalam untuk menemukan realitas dibalik kenyataan sosial kota Bandung. Melalui telaah terhadap temuan penelitian dalam konteks hubungan *vis á vis* pemuda dengan pemerintah, serta kritik terhadap realitas kepemudaan kota Bandung. Posisi *vis á vis* yang dimaksud adalah penempatan posisi saling berhadapan antara pemuda dengan pemerintah atau situs

kekuasaan. Peneliti menegaskan posisi *vis á vis* menurut temuan sebelumnya bahwa kepemudaan pada konteks Bandung Juara berstatus sebagai ruang politik. Dengan demikian peneliti membuka kemungkinan pada pembentukan argumen menurut asumsi entitas pemuda yang bersifat independen. Realitas yang diutarakan ini merupakan gambaran dari satu bentuk—realitas lainnya menunjukkan bentuk yang berbeda—hubungan pemuda dengan wacana Bandung Juara. Setidaknya ada dua fakta yang dapat menjadi bahan telaah realitas partisipasi kewarganegaraan pemuda dibawah konformitas wacana Bandung Juara. Kesatu, model hubungan (kelompok) pemuda terhadap kekuasaan; kedua, pertarungan simbolik yang terjadi pada ranah kepemudaan di kota Bandung.

1. Relasi Pemuda terhadap Kekuasaan

Penemuan lokus kajian kepemudaan, OKP dan komunitas pemuda, menjadi landasan peneliti untuk menggunakan terma *civil society* sebagai bingkai konseptual dalam mempresentasikan hubungan pemuda dengan kekuasaan. *Civil society* dalam pembahasan ini diterjemahkan sebagai sebuah bentuk atau entitas, secara eksplisit atau implisit berjalan tersistem atas dirinya dan membangun pola hubungan dengan kelompok lain juga kekuasaan yang dalam konteks pembahasan ini

dipresentasi oleh pemerintah kota Bandung. Setidaknya penjelasan sebelumnya mengenai komunitas dan OKP menyesuaikan terhadap empat ciri yang disampaikan Schmitter (2001), relatif independen, cukup diri untuk mempertahankan dan mempromosikan tujuan secara verbal deliberative atau aksi, tidak menunjukkan upaya mengganti agen negara atau produsen swasta atau menerima tanggungjawab negara secara keseluruhan, dan memegang teguh sikap saling menghormati. Sehingga kepemudaan di tempatkan ada dua kaki makna *civil society*, dirinya sebagai sebuah bentuk dan dirinya sebagai seperangkat nilai.

Berdasarkan pada aspek capital yang paling mudah dikonfirmasi, akses dalam bentuk hubungan institusional dan kebijakan versus kontrol, diputuskan bingkai konseptual dalam presentasi hubungan *civil society*-pemerintah menurut Riker (1995;1998) yakni hubungan otonom, fasilitasi/Promosi, *parallel cooperation*—istilah dan penjelasan diadopsi dari Fisher (1998), kooptasi, dan pembubaran. Adapun penggunaan konsepsi ini dilakukan dengan modifikasi menurut kecenderungan agen dan struktur mengikuti penalaran mengenai *habitus* Bourdian. Bentuk lain yang menggantikan model pembubaran adalah model hegemonik. Penggunaan konsep ini untuk menjelaskan realitas pada tataran populis

atau konformitas yang dibangun oleh diskursus Bandung Juara. Sosial kritis yang menjadi terma utama perlu juga diberi bingkai konseptual yang dimodifikasi bersama dengan model hubungan tersebut. Konsep pertama yang cenderung melihat dari sudut pandang struktur otoritas perlu diperkuat dengan sudut pandang agen. Setidaknya konsep hubungan agensi dapat dipresentasikan berdasarkan orientasi *civil society* dengan tiga model hubungan yakni, (1) *Model High Level Partnership; Grassroots Development*, (2) *Model High Level Politics; Grassroots Mobilization*, dan (3) *Model Empowerment at the Grassroots* (Eldridge 1995). Adapun model hubungan *civil society* terhadap kekuasaan di kota Bandung pada konteks Bandung Juara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Promosi

Karang Taruna mewakili hubungan promosi antara pemerintah terhadap pemuda kota Bandung. Kelompok atau organisasi kepemudaan ini menjadi pelengkap dalam aktifitas pemerintah, atau lebih jelasnya dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah menimbang Pemberdayaan Karang Taruna sebagai upaya menyelenggarakan pemerintahan menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Bersamaan dengan itu diterbitkan aturan yang melandasi Pemberdayaan Karang Taruna melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, nomor 23 tahun 2013, mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan karang taruna. Karang Taruna dimaksudkan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang mewadahi atau sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Struktur lembaga ini dibentuk menurut struktur otonomi daerah meliputi pengurus nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan.

Berkenaan dengan keberadaan Karang Taruna, pemerintah kota Bandung melakukan pengembangan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung, nomor 02 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Karang Taruna adalah mitra kerja pemerintah kelurahan sebagai wadah pengembangan generasi muda. Keanggotaan Karang Taruna kelurahan di kota Bandung ditegaskan mengikuti Undang-undang nomor. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yakni warga

kelurahan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Jelas bahwa Karang taruna kelurahan di kota Bandung adalah entitas partisipasi kewarganegaraan pemuda.

Keterkaitannya yang erat dengan pembangunan menempatkan Karang Taruna pada model *High Level Partnership* dengan orientasi *Grassroots Development*. Meski secara struktur melebihi yang dikonsepsikan oleh Eldridge, secara tugas di tingkat lokal lembaga ini sangat memenuhi kriteria. Orientasi lembaga ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 02 tahun 2013 tentang LKK meliputi, (1) menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya; dan (2) secara bersama-sama dengan Lurah dan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

High Level Partnership antara Karang Taruna dengan Pemerintah kota nampak kontras dalam konteks Bandung Juara. Lembaga ini secara legal formal merupakan subordinat dari program Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang mendapat kucuran dana pemerintah sebesar 100 (seratus) juta

pertahun. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013 – 2018, ditetapkan bahwa Karang Taruna merupakan bagian dari program Bandung Nyaman, dengan pelaksanaan teknis yang disesuaikan.

Peneliti beranggapan bahwa kemungkinan besar pada tataran praksis partisipasi terjadi upaya direktif dari kekuasaan pemerintah kota Bandung melalui tangan Lurah setempat. Perlu digarisbawahi, potensi pertukaran *capital* yang potensial, keberadaan modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik, menjadikan Karang Taruna sebagai lapangan tembak yang nyaman bagi proyektil politik.

b. Kooptatif

Telah menjadi pengetahuan publik bahwa KNPI bermula dari inisiatif rezim Orde Baru guna menyeragamkan pola pembinaan kepemudaan. Sehingga pada masa itu KNPI hampir dapat disebut sebagai lembaga korporat negara. Hingga kini setelah kekuasaan negara tidak lagi berada dibawah dominasi rezim Orde Baru, KNPI masih eksis dan mengklaim dirinya telah merubah orientasi gerakannya. Tidak lagi sebagai objek pembangunan namun subjek dan motor penggerak pembangunan dengan peran sebagai *moral force, social*

control, dan *agent of change*. Mereka menempatkan diri sebagai mitra pemerintah dalam hal kepemudaan dan hingga kini DPD KNPI Kota Bandung masih mendapat donor anggaran tetap dari pemerintah. Maka tidak heran apabila DPD KNPI Kota Bandung dianggap sebagai organisasi yang dekat dengan struktur politik tradisional dan cenderung menjadi alternatif aktifis kepemudaan untuk mendapatkan *capital* guna kiprahnya dalam dunia politik.

DPD KNPI Kota Bandung menaungi berbagai OKP dan pengurus di tingkat kecamatan. Pengurus periode 2014 – 2017 melakukan kategorisasi menurut ideologi OKP, nasionalis, kekaryaan, gerakan muda islam, mahasiswa, dan unsur wilayah yang disebut dengan kocek empat pilar. Setiap kelompok ideologis terdiri atas berbagai bendera OKP yang boleh jadi slogan ini ditujukan sebagai upaya sinergitas. Disamping itu DPD KNPI Kota Bandung beserta OKP yang dinaunginya mendapatkan pengawasan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Fungsi pengawasan terwakili oleh nomenklatur lembaga ‘Badan Kesatuan Bangsa’ yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung nomor 295 Tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja BKBPN. Lembaga ini bertugas untuk membantu walikota dalam

melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Adapun fungsi berkaitan dengan tugas pokok tersebut adalah pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan. Berdasarkan pengalaman peneliti menjadi pengurus salah satu OKP di kota Bandung, setiap peralihan kepengurusan, pengurus organisasi wajib memperbaharui data organisasinya ke BKBPN, melalui prosedur penyerahan Surat Keputusan pengangkatan pengurus baru, laporan pertanggungjawaban, dan syarat administratif lain meliputi akta notaris, surat domisili, dan sebagainya, untuk selanjutnya mendapatkan surat yang menerangkan status ‘keberadaan’ dari organisasi bersangkutan. Atas dasar itu peneliti menetapkan DPD KNPI Kota Bandung beserta semua OKP kedalam hubungan kooptasi.

Meskipun pada prakteknya tidak berjalan dengan mulus. Setidaknya OKP yang berkepentingan untuk berhubungan dengan pemerintah, untuk berbagai bentuk fasilitasi, dipersyaratkan atas kepemilikan surat keterangan keberadaan organisasi dari BKBPN. Peran pengawasan pun tidak berjalan dengan optimal selama OKP bersangkutan tidak berhubungan langsung dengan lembaga ini. Terlebih apabila yang menjadi permasalahan adalah aspek ideologis. Kendati demikian, lembaga ini sangat berperan dalam hubungan pembubaran suatu organisasi. Maka

keberadaan DPD KNPI kota Bandung pun, sekurang-kurangnya dapat mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sayangnya praktis dilapangan berjalan sangat politis dan oportunistik.

High level politics ditunjukkan dengan identifikasi motif politik, meski tidak selalu berhubungan dengan politik elektoral. Sependek pengamatan penulis, mayoritas pemuda berkesulitan untuk mengakses posisi struktural DPD KNPI Kota Bandung. Selain prasarat dari setiap OKP, mekanisme tradisional politik pun sangat kental terutama *bargaining position*. Terlebih penulis mengamati adanya dominasi petahana pada akses menuju struktur DPD KNPI Kota Bandung. Sehingga tidak heran apabila mendapati pejabat teras DPD KNPI sering diampu orang lama dan posisi ketua beberapa kali diisi oleh pejabat publik. Sebut saja pada periode 2011 – 2014 diampu oleh Dedi Supandi yang juga mengampu jabatan publik sebagai Camat dan periode 2014 – 2017 diampu oleh Sigit Iskandar yang juga mengampu jabatan publik sebagai kepala bidang Pos dan Telekomunikasi, Diskominfo Kota Bandung ketika itu. Penulis sangat menyayangkan kondisi demikian. Pasalnya DPD KNPI Kota Bandung merupakan wadah strategis pemuda untuk lebih dekat dengan struktur tradisional politik. Kendati program DPD KNPI Kota

Bandung dapat dikatakan memfasilitasi potensi muda dalam hal kaderisasi kepemimpinan, namun cara-cara pragmatis yang dilestarikan berpotensi menambah renggang hubungan antara politik dan minat pemuda. Melihat kenyataan demikian langkah membangun demokrasi yang lebih segar rasanya masih jauh dari pelupuk mata. Hubungan DPD KNPI dengan OKP lain pun cenderung ketika momen Musyawarah Daerah yang kepentingannya kuat dalam menggalang suara kemenangan calon ketua. Terasa bahwa pada segi ini, DPD KNPI lebih berorientasi *Grassroots Mobilization*. Meski pengakuannya sebagai organisasi wadah pencetak kepemimpinan, namun cara pragmatis-transaksional tidak menegaskan itu. Adapun program lain seperti pelatihan, seminar, dialog publik, dan sebagainya, penulis menganggapnya hanya sebatas seremoni simbolik. Sejauh ini belum nampak upaya simultan yang menghubungkan generasi muda—yang berdasarkan aturan perundang-undangan—dengan domain politik. Tegas peneliti menyatakan bahwa tugas DPD KNPI adalah untuk mendekatkan domain kepemudaan dengan politik praktis, bukan seminar lokakarya keterampilan berdagang dan sejenisnya.

Begitu juga dalam konteks Bandung Juara, pada event penobatan kota Bandung sebagai kota layak pemuda. Nampak terjadi

perebutan simbolik. Peneliti mendapat konfirmasi mengenai upaya DPD KNPI Kota Bandung mendorong capaian tersebut. Terlepas dari itu, peneliti kemudian akan konsentrasi pada ‘apa’ yang diperebutkan dalam realitas partisipasi pemuda kota Bandung, serta makna dari klaim tersebut. Meski demikian DPD KNPI Kota Bandung pun berpotensi sebagai lembaga penguatan. Contoh kasusnya adalah tergabungnya kelompok bermotor Brigez dan XTC. Lembaga ini menjadi sangat representative untuk membangun citra kelompok bermotor yang semula ‘brutal’ menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda yang dinilai positif oleh masyarakat. Meski masih diperlukan penguatan simbolik lainnya seperti, upaya pemasyarakatan, upaya pembinaan, dan pelibatan bersama kelompok bermotor dalam program pembangunan kota Bandung. Bila DPD KNPI hanya berhenti sebatas memberikan status baru kepada kelompok bermotor tanpa membangun budaya kepemudaannya, maka kesimpulannya, DPD KNPI baru menjalankan peran mobilisasi.

c. *Parallel Cooperation*

BCCF adalah sampel paling tepat untuk model hubungan *parallel cooperation*. Keberadaan komunitas dengan potensi kreatif yang besar semacam BCCF sangat menguntungkan bagi pemerintah kota. Seperti

kegiatan *Helar Fest* Bandung 2009. Festival ekonomi kreatif yang melibatkan lebih dari 67 event dari 30 lebih komunitas kreatif kota Bandung yang berlangsung selama 2,5 (dua setengah) bulan berhasil menyumbangkan pergerakan ekonomi kota Bandung hingga 100 milyar dalam waktu 1,5 (satu setengah) bulan (Kamil, 2015). Berikutnya gerakan *Babakan Siliwangi World City Forest* sebagai upaya menetapkan bahwa kawasan babakan siliwangi Bandung adalah Hutan Kota Dunia yang wajib untuk dijaga secara bersama-sama. Memberikan citra baik bagi partisipasi masyarakat kota Bandung dalam hal membentuk budaya pembangunan. Upaya semacam ini pun menunjukkan bahwa warga kota Bandung memiliki kecukupan dalam mengawasi kinerja pembangunan pemerintah kota.

Kasus studi yang dapat merepresentasi hubungan dengan model *High Level Partnership* antara BCCF dan pemerintah kota Bandung adalah upaya mendorong kota Bandung masuk sebagai anggota dari *UNESCO Creative City Network* (UCCN) sebagai kota desain. Upaya ini melibatkan berbagai *stake holder*, Kemendikbud, pemerintah kota Bandung, UNESCO, termasuk BCCF yang diantaranya adalah Fiki Satari dan RK. Fiki Satari yang ditunjuk sebagai ketua tim *dossier* Bandung untuk UNESCO telah menggarap

program ini semenjak tahun 2012 (dua ribu dua belas). Keterlibatan bersama stakeholder tidak hanya dalam hal administrasi, terlebih adalah dalam diskusi untuk menetapkan orientasi kota Bandung sebagai kota desain. Hingga pada tanggal 11 Desember 2015, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, mengumumkan 47 kota dari 33 negara sebagai anggota baru dari UCCN. Kota Bandung pun termasuk salah satu dengan predikat sebagai kota desain. Kasus studi ini menegaskan upaya BCCF sebagai *civil society* dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

Pada konteks kepemudaan, komunitas ini melakukan hubungan *Grassroots Development*. Meski BCCF adalah forum lintas komunitas, visi dan misi membangun konformitas kreatif pun dilakukan anggotanya melalui berbagai kegiatan rutin berupa diskusi dan pelatihan inovasi dan kreatifitas. Dalam kegiatan rabuan yang dilaksanakan, tidaknya teridentifikasi upaya pembinaan kepada konstituen yang relative berusia muda. Pemaparan diberikan oleh komunitas yang tergabung dalam BCCF. Semacam paket komplit, *helar fest* Bandung yang digagas dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan pemberdayaan potensi kreatif di masyarakat. Belum lagi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing komunitas yang tergabung. BCCF adalah konfigurasi *civil society* yang

tepat diterapkan terutama pada abad ke-21 yang menuntut jejaring, pengetahuan, dan implementasi gagasan.

Ditemukan hal unik dari pola hubungan dalam ruang politik. Paska ditetapkannya Bandung Juara sebagai pemenang kontestasi pilwalkot Bandung 2013. Ditetapkan pula ketua BCCF Fiki Satari sebagai ketua Karang Taruna kota Bandung. Peneliti memaknai hal ini sebagai transformasi BCCF dari model hubungan *high level partnership* menjadi *high level politics*. Uniknya cara-cara ini lebih tampak seperti *grassroot development* daripada *grassroot mobilization*. Dalam sebuah artikel opini yang berjudul *komunitas kreatif muda di dasar piramida* Fiki Satari mengemukakan bahwa terjadi kerjasama antara BCCF dengan Karang Taruna hingga tataran kelurahan. Dirinya mengemukakan gagasan *Karta Troopers, Distribution Center*, dan Musikarta sebagai improvisasi model kolaborasi dalam hal inovasi, kreatif, dan pembangunan ekonomi berbasis pemuda.

Meski pengakuannya adalah “kerjasama,” kasus ini perlu dilihat melalui sudut pandang politik. Partisipasi kewarganegaraan yang dilakukan BCCF menjadi penanda dari lahirnya konsep *high level politik* yang baru, dengan ciri *grassroot development*. Kasus ini membuktikan *civil society* sekalipun, dengan ketersediaan modal

ekonomi, modal kultural, dan modal sosial telah cukup diri untuk melampaui *political society*, yang dewasa ini tidak tampak kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Dibuktikan dengan kemenangan RK. Segala kebaruan dalam partisipasi kewarganegaraan kota Bandung hadir diantara ironi partai politik yang tinggal tegak bergantung pada legitimasi konstitusional. Menjadi makelar bagi aktifis komunitas atau pengusaha yang hendak bertandang ke jenjang politik praktis.

d. Otonomi

Partisipasi dengan orientasi Ekspresi hobby, minat, dan tujuan ini nampaknya tidak dianggap berbahaya, sehingga tidak melekat kewajiban pada mereka mengikuti prosedur pengawasan sebagaimana diberlakukan kepada OKP. Atau boleh juga karena sifatnya yang sporadis dan tidak terstruktur, membuat pengawasan menjadi sulit dilakukan. Bentuk partisipasi ini bisa terbentuk secara spontan dan keberadaannya intermiten. Maka ketiadaan pengawasan semacam sikap lepas tangan pemerintah terhadap komunitas. Termasuk dalam hal kelembagaan dan keuangan komunitas, cenderung dikelola sendiri tanpa campurtangan pemerintah. Demikian halnya apabila komunitas tertentu tidak membangun akses dan memperjuangkan kepentingannya atas fasilitasi dari pemerintah secara langsung.

Atas dari itu, komunitas tergolong pada bentuk hubungan otonom.

Model hubungan otonom ini ditunjukkan pula dengan orientasi komunitas kepada pemberdayaan masyarakat—setidaknya menurut tujuan dan latar belakang mereka. Kegiatan mereka lebih berfokus kepada penjangkaran dan pemberdayaan, baik anggota atau peminat mereka, juga masyarakat yang menjadi target kegiatan. Dari sekian banyak komunitas didapat informasi yang membangun asumsi peneliti bahwa komunitas tidak terlalu tertarik menjalin hubungan dengan pemerintah. Meskipun mereka pun tidak menghindari kontak dengan pemerintah. Semangat kemandirian yang kuat dan kepercayaan terhadap prinsip “*lakukan apa yang dapat dilakukan, sekecil apapun itu,*” adalah salah satu alasan mereka tidak tergantung kepada pihak diluar kepentingan mereka. Keyakinan mereka pun disusul dengan kepercayaan bahwa perubahan akan muncul akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah. Nampak juga mereka tidak begitu tertarik pada bentuk kegiatan berskala besar. Mereka cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya lokal. Maka menurut orientasinya, komunitas tergolong pada model *empowerment at the grassroot*. Penjelasan tersebut didasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada tiga

komunitas dengan orientasi dan hubungan terhadap pemerintah juga kelompok yang berbeda.

Kesatu, Forum Rock n' Roll Bandung. Orientasi komunitas ini adalah pemberdayaan, khususnya penguatan jejaring sesama musisi. Wujud kegiatan komunitas ini pun mendekati latar dan tujuan mereka, sharing informasi dengan mengoptimalkan media online, kegiatan *coaching clinic*, melaksanakan event musik, parade atau festival. Didapat keterangan bahwa berjalannya kegiatan Forum Rock n' Roll Bandung pun ditunjang oleh pemberdayaan sumber daya anggota, semisal *udunan* dari partisipan. Tidak hanya berupa uang, bantuan berupa properti pertunjukan, *sound system*, fasilitas café untuk pertunjukan, sangat menunjang pergerakan dari forum ini. Sependek pengamatan peneliti, manfaat komunitas ini—setidaknya bagi para partisipannya—yakni menjadi ruang belajar musik bagi pemuda yang tidak berlatar belakan pendidikan musik; wadah untuk unjuk gigi dan promosi karya yang dibuat oleh pemuda; dan merawat motivasi dalam mewujudkan cita-cita di jalan musik.

Kedua, komunitas berbagi nasi. Kegiatan ini mulai dilakukan sekitar tahun 2010 awal dengan latar belakang, “kesadaran atas kelebihan rezeki, dan keberadaan masyarakat dibawah garis kemiskinan di kota

Bandung.” Partisipan kegiatan ini merasa terdorong untuk berpartisipasi oleh karena kegiatan berbagi nasi yang tidak memerlukan banyak biaya. Keegiatannya cenderung mewadahi ekspresi altruisme, membantu sebatas kemampuan seseorang. Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga negara yang memiliki empati sosial tinggi namun memiliki kemampuan atau modal yang terbatas. Kegiatan ini pun dianggap penanda bahwa pemuda memiliki sifat kepedulian dan semangat berbagi yang tinggi. Selain itu, maraknya kegiatan dengan basis komunitas turut mendorong berjalannya kegiatan berbagi nasi ini.

Ketiga, komunitas Kita Indonesia. Komunitas yang memulai gerakan pada tahun 2011 ini berlatar belakang rasa simpati terhadap kondisi sosial di sekitar, juga anggapan atas ketiadaan kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada pengabdian masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi mahasiswa tersebut, bergerak pada tiga aspek, pendidikan, lingkungan, dan kebudayaan. Pada mulanya, gerakan ini dijalankan secara langsung dengan menjanging minat lewat komunikasi interpersonal. Kegiatan yang dijalankan berupa pengabdian kepada sekolah yang kekurangan guru. Seperti komunitas sosial yang lainnya, semangat altruism yang dibangun tidak jauh dari, “berbagi atau berbuat sejauh apa yang

dapat diperbuat.” Akhirnya menjadi semacam ideologi bagi para peminat gerakan semacam ini. Pendiri yang berlatar belakang sebagai mahasiswa, serta partisipan juga kebanyakan mahasiswa, menjadikan implementasi tri dharma perguruan tinggi sebagai landasan dari gerakan ini. Khususnya pada poin ke tiga, pengabdian pada masyarakat. Kita Indonesia menjalankan kegiatan yang lebih bersifat langsung seperti, pada bidang pendidikan: mengajar di sekolah yang kekurangan guru; menjadi kakak asuh di pantiasuhan; serta memberikan informasi dan advokasi beasiswa. Pada bidang lingkungan: sasapu Bandung; dan jumsih di daerah dalam program safari desa. Serta pada bidang kebudayaan: pagelaraan di daerah, dalam program safari desa; juga menjaring potensi seni budaya yang ada di daerah.

Kolaborasi yang terwujud atas pengakuan pemerintah terhadap gerakan komunitas ternyata tidak selamanya berjalan dengan baik. Tetap ada yang perlu diperhatikan terutama soal prosedur. Komunitas yang tidak terbiasa dengan kerjasama dengan lembaga pemerintah tidak begitu memahami, bahkan nyaris abai dengan prosedur fasilitasi dan penganggaran. Begitu yang dialami oleh komunitas Kita Indonesia. Dinyatakan bahwa, gagasan kolaborasi yang diusung sangat bagus, namun kurang mengayomi semua. Berdasarkan

pengakuan responden, dirinya merasa bahwa gerakannya yang diadopsi dalam kerangka kolaborasi, tidak mendapat apresiasi, malah “diaku” oleh pihak-pihak tertentu. Juga dalam hal kerjasama, pihak tertentu lah yang ternyata memainkan GPS sebagai proyek tanpa sepengetahuan dari komunitas Kita Indonesia. Pada akhirnya dianggap mencederai semangat altruism dan kesukarelaan sebagai nilai utama dari gerakan komunitas.

Termasuk dengan dibentuknya *Bandung Youth Forum*. Komunitas Rock n’ Roll Bandung adalah salah satu komunitas yang tergabung kedalamnya. Peneliti menemukan bahwa inisiasi ini dilakukan oleh pemerintah dan beberapa elemen komunitas pemuda kota Bandung. Nampak yang berubah adalah upaya akses yang dibangun pemerintah kepada komunitas pemuda. Pada konteks Bandung Juara, ditemukan tanda bahwa hubungan otonom antara pemerintah dengan pemuda mulai bergeser. Meski belum semua terangkul, seperti komunitas Berbagi nasi dan Komunitas Kita Indonesia. Setidaknya dari daftar yang telah dikemukakan sebelumnya, sebanyak itu yang telah terdata dan menjaankan interaksi langsung dan tidak langsung dengan pemerintah. Namun, peneliti memberikan sudut pandang politik terhadap realitas tersebut. Pasalnya simpul komunitas BCCF pun merupakan forum lintas komunitas yang

hampir serupa BYF. Sehingga nampak jenjang hegemonik, dimana komunitas merupakan subordinat dari kepanjangan tangan kepentingan politik. Sehingga nampak pada tataran forum lintas komunitas merupakan upaya *grassroots mobilization*. Realitas tersebut akan dibahas selanjutnya.

2. *Political Struggle* Kepemudaan Kota Bandung

Political Struggle terbagi atas dua ranah yakni: pertama *Political Struggle pada* Skala Akses. Menurut fakta yang didapat sejauh pengamatan peneliti, baik sebagai pemerhati juga sebagai warga negara partisipatif dalam kepemudaan. Pada dasarnya DPD KNPI Kota Bandung memberikan makna inklusif terhadap konsep pemuda. Berdasarkan temuan yang telah dibahas pun dapat ditegaskan bahwa situs ini mengakui realitas partisipasi kewarganegaraan kota Bandung yang terdiri dari komunitas pemuda dan OKP. Namun, nampaknya DPD KNPI Kota Bandung tidak membuka akses formal dan ideologis kepada entitas komunitas. Anggapannya menunjukkan bahwa keterlibatan pada komunitas agaknya keliru untuk membangun kepemudaan kota Bandung. Adapun kebenaran partikular dari relasi tersebut menunjukkan bahwa posisi konformitas lebih dominan pada kelompok komunitas. Sehingga jarak yang dibangun pada

wacana dan opini tersebut cenderung dipengaruhi konteks politik dimana secara tegas dinyatakan bahwa *habitus* partisipasi DPD KNPI Kota Bandung adalah mengakses posisi strategis seperti memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah dalam arti mengawasi dengan kemungkinan mendukung atau tidak mendukung serta berperan sebagai pelopor pembaharuan dan pelatuk perubahan. Lain hal dengan Komunitas yang dianggapnya sebagai bagian definitif dari kredo ideologis Bandung Juara. Juga partisipasi kelompok DPD KNPI Kota Bandung beserta jajaran OKP yang dinaunginya dinyatakan membentuk moda partisipasi pada wilayah mencetak kader kepemimpinan.

BYF sebagai himpunan komunitas cenderung tidak memiliki sejarah panjang karena kehadirannya yang sering kali spontanitas dan tidak mengikat. Akan tetapi peneliti beranggapan bahwa upaya produksi wacana Deklarasi BYF merupakan ketaksaan. Disinyalir terjadinya deklarasi atas dorongan dari dominasi yang dilatarbelakangi oleh beberapa kemungkinan: 1) kepentingan pemerintah, dalam kasus ini adalah dinas kepemudaan untuk menghimpun kekuatan demi suksesi kepentingan kedinasannya; 2) upaya gap kepemudaan yang merasa terancam dengan eksistensi gap dominasi “Kroni Bandung Juara” yang juga berbasiskan pemuda

yang terhimpun oleh BCCF dan Karang Taruna; 3) kepentingan segelintir aktor yang mendominasi jaringan komunitas tertentu demi mengakses jalur-jalur kebijakan yang berorientasi pada perolehan dan penguasaan atas program-program kepemudaan Kota Bandung. kendatipun demikian wacana ini menunjukkan fakta bahwa pemuda kota Bandung cenderung memberikan perhatian pada keterlibatan dalam ranah publik dan keterhubungan dengan pemerintah. Dari ketiga anggapan tersebut diketahui bahwa ada intensitas tertentu yang dilakukan pemerintah kepada pemuda, serta upaya pemerintah untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam urusan pemerintah. Terlebih adalah upaya perjuangan pemuda untuk memperoleh hak sebagai bagian kepemudaan kota Bandung, terutama dalam memperjuangkan keyakinannya bahwa komunitas merupakan situs partisipasi kewarganegaraan yang layak mendapat ruang dan penunjang lainnya.

Poin penting dari realitas ini adalah gap yang terjadi tidak sekedar menjadi buah bibir. Terlepas dari kepentingan yang melatarinya, pada peristiwa ini pemuda dianggap telah memiliki kesadaran partisipatif yang relative tepat untuk memperjuangkan haknya. Meskipun peneliti memandang bahwa realitas tersebut merupakan ancaman bagi eksistensi OKP yang pada kenyatannya di kota Bandung

akses terhadap kebijakan dan anggaran publik dapat dilakukan dengan moda dan situs partisipasi apa pun. Terindikasi pada kata ganti orang pertama ‘kami’ yang dialamatkan pada komunitas dalam yang diklaim sebagai ‘anak muda Bandung’. Klaim tersebut merupakan upaya sensor referensial, dimana tidak semua elemen pemuda terwakili pada wacana tersebut, termasuk karang taruna dan DPD KNPI Kota Bandung. Wacana ini menyembunyikan kepentingan pengusung deklarasi yang notabene adalah Dinas Pemuda dan Olahraga agar seolah-olah pemuda melakukan inisiasi untuk fusi pergerakan komunitas pemuda berbasis komunitas. Anggapan peneliti adalah, Dinas Pemuda dan Olahraga kota Bandung memahami pentingnya mengakomodir dan membuat akses kepada komunitas pemuda untuk menunjang program pembinaan. Melalui wacana ini diyakini bahwa realitas gap antara komunitas dan OKP sangat kuat dan sukar dicairkan, sehingga akses langsung berupa pengakuan terhadap eksistensi komunitas dianggap perlu untuk dilakukan. Sekaligus peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen komunitas merupakan agen dari konformitas Bandung Juara meskipun secara ideologis mereka bagian dari kredo yang dibangun.

Peneliti mempersamakan antara BCCF dan Karang Taruna karena wacana yang dipilih

mewakili kedua situs tersebut. Pasalnya pewacana secara definitive merupakan unsur ketua dalam kedua situs tersebut. Sehingga dianggap mewakili pandangan keduanya. Wacana eksposisi ini menerangkan kontekstualitas gagasan pewacana yang diimplementasikan melalui Karang Taruna. Melalui analisis terhadap wacana Komunitas Kreatif Muda di Dasar Piramida ditemukan kebenaran partikular mengenai stratifikasi pemuda menurut kognisi pewacana. Terdapat dua stratifikasi yakni komunitas kreatif muda dan pemuda sebagai sumberdaya lokal yang berada di dasar piramida. Komunitas kreatif muda yang dimaksud adalah kelompok dengan potensi kreatif, sebagai referensinya adalah BCCF dan komunitas muda. Warga muda sebagai sumber daya lokal adalah kelompok dengan kondisi ekonomi di bawah rata-rata. Relasi yang dibangun pada wacana ini mengikuti stratifikasi tersebut yakni, komunitas muda memegang peran melakukan inisiatif yang tepat dan kelompok di dasar piramida sebagai objek pemberdayaannya. Adapun yang menjadi referensi dari kelompok yang berada di dasar piramida adalah agen dari Karang Taruna yang tersebar di setiap wilayah di kota Bandung. Artinya peran strategis pada stratifikasi tersebut dipegang oleh BCCF dan kepemimpinan Karang Taruna yang notabene dipimpin pula oleh pimpinan BCCF. Pun situs

ini merupakan kredo ideologis dan kelompok dalam dari hegemoni Bandung Juara berdasarkan pada fakta yang didapat dan relasi antara Ridwan Kamil dan Fiki Satari yang terbentuk melalui BCCF.

Kedua, Political Struggle pada Skala Populis/Symbolik. Bandung Juara dan Kritikusnya Dari pengamatan terhadap struktur skematik wacana, peneliti mendapati basis kognisi yang mempengaruhi produksi wacana di kedua belah pihak. Sekurang-kurangnya kajian tersebut menunjukkan kontruksi hegemoni *vis á vis* kontra-hegemoni. Setidaknya peneliti meyakini bahwa terjadi perebutan kuasa pada realitas partisipasi kewarganegaraan dalam aras wacana. Melalui temuan tersebut pun didapati bahwa tidak ada wacana yang secara terang-terangan menggugat *doxa*—dalam konteks wacana ini adalah *etos* kolaborasi. Terpantau bahwa proposisi yang disajikan cenderung memberikan penguatan terhadap *doxa*, baik wacana yang bernuansa Bandung Juara maupun yang kontra terhadapnya. Maka dugaan peneliti bahwa perebutan terjadi untuk memperoleh modal simbolik dengan cara menjatuhkan simbolik dari hegemoni Bandung Juara. Antara yang mempertahankan kooptasinya dengan spektrum makna dari konsep ‘kebaikan’, serta yang coba merebut

perhatian dengan kritik pada spektrum makna ‘pencitraan’.

Wacana berjudul *Bandung as a Gimmick City* merupakan salah satu wacana kritik yang dikemas dengan gaya sarkastik. Wacana ini memberikan kritik terhadap perilaku pemerintah dan masyarakat yang dianggap sebagai pencitraan. Hal tersebut didapati melalui penemuan ketaksaan pada wacana. Ketaksaan ditemukan melalui identifikasi proposisi “bahkan *gimmick* sangat baik untuk kegiatan bisnis” yang memiliki makna positif, namun berterimanya secara koheren dengan gagasan mengenai wanita penduduk Bandung dengan makna yang negatif yang dijelaskan memberi makna ambigu pada kalimat tersebut. Dapat ditegaskan bahwa maksud pewacana adalah mencemooh gagasan pembangunan dengan penanda ideologis “kreatif” melalui proposisi “baik untuk bisnis” sebagaimana juga terdapat pada proposisi “*Gimmick* tidak perlu selalu diartikan dengan negatif, bahkan di sisi lain sangat bagus untuk suasana bisnis...” Proposisi tersebut bahkan menegaskan penentangan pewacana terhadap ideologi kapitalisme dengan metafora “bisnis”. Pewacana menekankan makna yang lebih sarkastis yakni, pemerintah “Bandung Juara” menduplikasi sifat-sifat pelacur atau melacurkan kota Bandung. Telaah sintaksis ini menemukan dua fakta partikular yang di sensor

dalam wacana. Pertama, pewacana melakukan sensor prasangka bahwa pemerintah Bandung Juara hanya menjalankan politik pencitraan dengan ekspose keberhasilan pembangunan yang dianggapnya sebagai cara-cara yang sama dengan penjajah. Kedua, sensor yang menunjukkan kebenaran partikular mengenai posisi pewacana sebagai kelompok luar atau oposisi dari hegemoni Bandung Juara dan hegemoni ideologis dengan penanda utama ‘kreatif’. Wacana ini menunjukkan strategi transformasi konsep hegemonik ‘kreatif’ kepada konsep ‘*gimmick*’ atau ‘pencitraan’. Dapat diartikan bahwa wacana ini mencoba untuk menurunkan kapabilitas simbolik Bandung Juara. Hal tersebut nampak dilatarbelakangi oleh prasangka pewacana terhadap pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan bisnis atau menurut kognisi pewacana dapat dikatakan berpihak kepada pelestarian kapitalisme. Dengan kata lain menyerang kuasa simbolis Bandung Juara yang mentahbiskan dirinya berpihak kepada semua golongan dan mengabdikan untuk masyarakat.

Pada skala populisme sekurang-kurangnya dapat diketahui bahwa pertarungan simbolik yang terjadi tidak tampak membangun wacana hetero-doxa atas etos kolaborasi. Kritik yang disampaikan hanya berkisar pada perebutan simbolik antara kritik

dan kreatif; upaya menggugat simbolik yang telah dibangun pemerintah kota Bandung melalui upaya menegasikan. Hal tersebut hanya dianggap sebagai kerikil diatas hotmix wacana Bandung Juara. Namun tetap perlu diperhitungkan pada kajian realitas. Entitas semacam itu cukup berdampak terhadap upaya pembangunan kolaborasi diantara pemuda. Sebab entitas semacam itu menunjukkan tidak hanya kegaduhan melainkan ada perbedaan cara pandang diantara pemuda. Artinya bila dikuantifikasi realitas pada skala populis ini menunjukkan simpangan dalam konformitas pemuda terhadap etos kolaborasi. Maka didapati bahwa konformitas terhadap etos kolaborasi tidak terjadi secara total.

3. Tokenisme: Realitas Partisipasi

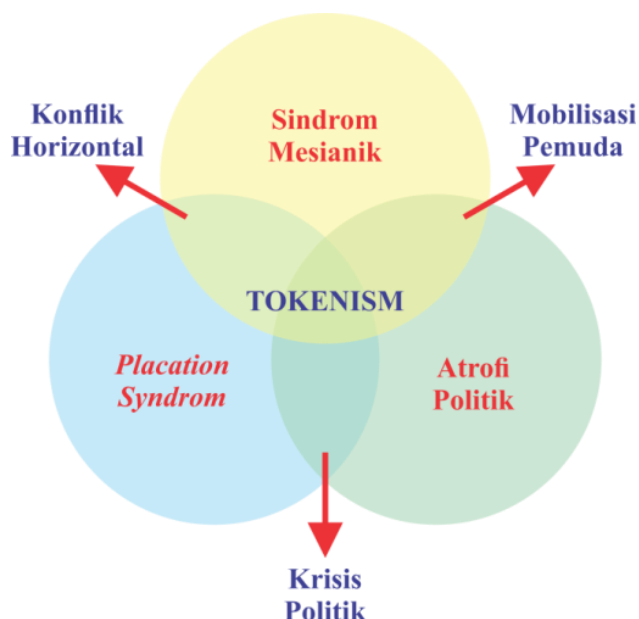
Kewarganegaraan Pemuda Kota Bandung

Realitas pada skala akses menunjukkan progres dan produktifitas; berbeda dengan kelompok pada skala populis. DPD KNPI Kota Bandung yang mampu mengakses program PIPPK dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam program tersebut. DPD KNPI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyaluran dan pemetaan program prioritas dimana kepentingan DPD KNPI Kota Bandung sebagai situs organisasi kemasyarakatan pemuda dapat disalurkan. Posisi tersebut tidak dapat dipersamakan dengan posisi Karang Taruna organisasi

bentukan pemerintah. Meskipun demikian pada tataran strategis nampak gagasan yang matang dan bersesuaian secara ideologis dijelaskan oleh Fiki Satari dalam wacananya. Dengan akses partisipasi yang strategis demikian pemuda dapat mengaplikasikan kritik sekaligus mendorong pembangunan sesuai dengan harapan. Berbeda hal dengan cara-cara menggugat simbol-simbol yang hanya menghasilkan stigmatisasi dan debat kusir yang merugikan kedua belah pihak.

Peneliti beranggapan bahwa kondisi yang ditunjukkan merupakan realitas jembatan bila setiap pemangku kebijakan dan elemen kepemudaan secara sadar diri berupaya mengatasi beberapa penyakit partisipasi yang dianggap menjadi penyebab terjadinya dekadensi hegemoni Bandung Juara dalam mendorong konformitas etos partisipasi pemuda. Mengikuti penalaran Arnstein (1969) *Ladder of Citizen Participation* penyakit partisipasi kewarganegaraan pemuda kota Bandung antara lain digambarkan dalam skema interpretif berikut ini,

Gambar 2. Skema Realitas Pemuda Non-Partisipasi



Pertama, *Placation Syndrom* sebagai penghambat kerjasama diantara situs partisipasi kewarganagaraan. Sindrom ini merupakan penyakit yang membuat kelompok pemuda sulit berdampingan dengan situs yang berbeda paham dan golongan karena kecenderungan tingginya ego simbolik. Sindrom ini berakibat pada sikap enggan memulai inisiatif kerjasama karena merasa tidak berada pada kondisi yang berdamai. Seperti sikap yang ditunjukkan oleh DPD KNPI Kota Bandung terhadap kelompok komunitas, yang sebenarnya bila terjadi inisiasi untuk kerjasama, kemungkinan besar akan terjalin pengembangan dua sisi, kaderisasi dan inisiatif sosial yang lebih massive dan populer. Gejala dari sindrom ini meliputi, sulit memberi sinyal damai meskipun dalam wacana secara tersirat,

membanding-bandingkan situs satu dan lainnya serta menginformasikan bahwa situsnya lebih unggul, berdalih tidak mendapat perhatian atau tidak dirangkul baik oleh pemerintah atau situs lainnya, dan yang paling parah menganggap rendah situs lain.

Kedua, Sindrom Mesianik sebagai penyebab luputnya perhatian partisipatif masyarakat kepada lembaga politik di luar eksekutif. Istilah mesias diambil dari bahasa Ibrani "*mashiah*" yang artinya "yang diurapi." Peneliti mengambil pokok gagasan dalam perkembangan makna mesias yakni sosok yang diharapkan dapat membawa suatu kaum pada keselamatan dan kejayaan. Kondisi ini dianggap penyakit partisipasi sebab, seolah-olah segala persoalan dan nasib masyarakat—baik itu pada skala negara, bangsa, domestik

atau provinsi, kota dan kabupaten—ditentukan oleh satu orang pimpinan, apakah presiden, gubernur, bupati dan walikota. Sindrom mesianik ditunjukkan melalui fakta partikular pada wacana Bandung Juara yakni, wacana interaksi langsung masyarakat dengan pemerintah melalui saluran aspirasi yang terlampau luas. Seperti halnya pembuatan twitter pada setiap dinas, aplikasi lapor warga, interaksi interpersonal dengan walikota dalam media sosial, yang secara teknis sering kali berkendala dan kontroversial. Kebenaran partikular tersebut bukan tentang upaya pemerintah membangun citra sebagai penyelamat, melainkan betapa masyarakat menaruh harapan yang amat sangat kepada eksekutor kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, yang belum tentu kehendak mereka tersebut terakomodir dalam kebijakan.

Demokrasi sosial dimungkinkan dapat berjalan dengan mulus dan mengesankan berjalannya demokratisasi. Akan tetapi persoalannya adalah prakondisi tersebut harus didorong kepada kondisi partisipasi kewarganegaraan untuk tujuan efektifitas politik. Pada kondisi tersebut dapat mewujudkan tatanan Negara integral dimana masyarakat sipil dan masyarakat politik berada pada kondisi terintegrasi dan stabil (Gramsci, 1971). Gejala ini pun diketahui melalui

kapabilitas kritik atau tradisi kritis yang sekedar ditujukan kepada figur walikota. Kelompok kontra mengembangkan antithesis Bandung Juara dengan pemerian stigma pencitraan dan pembodohan. Secara ideologis mereka menyatakan bahwa hegemoni Bandung Juara disampaikan sebagai mekanisme pencitraan dan pembodohan untuk menutupi kepentingan politik dan penindasan kelas bawah. Kelompok kontra menempatkan figure RK sebagai orang yang tidak baik dan kelompok hegemonik sebagai orang yang bodoh. Peneliti beranggapan bahwa pandangan demikian merupakan ancangan yang keliru dalam membangun wacana kritik. Sejauh kritik hanya dialamatkan pada perangai RK dan simbolisasi dalam wacana Bandung Juara, dalam kondisi hegemoni Bandung Juara yang dominan hanya akan merugikan simbolis kritik sebagai pranata partisipasi kewarganegaraan. Peran kritik yang sangat penting perlu penguatan dengan pendekatan terhadap hal-hal yang bersifat substansif dan dilakukan dengan kemampuan kelompok yang solid dan konsen terhadap isu tertentu. Keuntungan yang didapat dari kritik yang stigmatik demikian hanya berkisar pada penguatan kelompok ideologis. Sehingga wacana kritik tidak memiliki daya mampu yang kuat secara sosial dan cenderung memarginalkan dirinya dan mendesak dirinya menjadi wacana pinggiran. Pada kenyataannya

harapan mereka merubah persepsi publik tentang citra pemerintah, hanya menunjukkan bahwa kelompok kritik pun terjebak dan digiring untuk menghabiskan energi kritik terhadap tataran simbolis yang notabene berdampak marginalisasi kelompok kritik dan pengembosan modal simbolik budaya kritis.

Sindrom mesianik menyebabkan peran anggota legislatif sebagai perwakilan rakyat seolah tidak nampak penting karena minimnya pemberitaan. Secara simbolik baik, akan tetapi ekspose demikian dirasa terlalu berlebihan. Sebab demokrasi Indonesia dibangun atas dasar keterwakilan. Menuju efektifitas politik, masyarakat perlu pemahaman bahwa suara mereka terwakili pada lembaga legislatif serta menjadi penyeimbang otoritas eksekutif. Bila aspirasi masyarakat dirasa tidak terwakili, mereka faham bahwa kursi legislatif dapat direbut dalam pemilihan umum melalui mekanisme yang ada. Bila sindrom mesianik ini dibiarkan tanpa inisiasi penyadaran yang dilakukan pemuda, maka bentuk partisipasi perwakilan pada konteks politik sulit untuk dibangun.

Sindrom mesianik di atas berhubungan erat dengan penyakit partisipasi *ketiga* yakni atrofi politik. Sejauh daya tangkap penelitian ini, belum dapat menentukan mana faktor yang menjadi stimulus, apakah sindrom mesianik atau atrofi politik. Keduanya memiliki peran

saling menyebabkan dan hadir secara bersamaan. Meski demikian keduanya tidak dapat disimplifikasi kedalam satu konsep karena peneliti beranggapan hubungan keduanya berimbas pada kecenderungan yang berbeda pada penempatan hubungan yang berbeda. Bila persoalan yang dihadapi adalah dominasi hegemonik dan penyalahgunaan kekuasaan dari eksekutif, maka pola dominasinya dibentuk berdasarkan pemahaman aparat hegemoni terhadap krisis politik masyarakat—berupa degradasi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, kemudian memunculkan figur yang seolah-olah bersih dengan pemerian simbol ‘independen’. Adapun seperti dijelaskan bahwa sindrom mesianik pun hadir karena kemerosotan kepercayaan terhadap lembaga politik, bahkan terhadap dinamisme politik. Perbedaan ini dilakukan sebab sesungguhnya sindrom mesianik menunjukkan berjalannya roda politik, dengan kepercayaan masyarakat kepada lembaga eksekutif. Kondisi demikian tidak seutuhnya menunjukkan kondisi krisis politik. Peneliti mempertahankan krisis politik sebagai masalah partisipasi kewarganegaraan berdasarkan pada mesianik sindrom yang dialami masyarakat cenderung memberi peluang terhadap dominasi politik kelompok dengan modal yang kuat—terutama modal ekonomi dan budaya. Maka pada kondisi

demikian akan sulit mewujudkan efektifitas politik melalui penguatan kelembagaan masyarakat dalam konteks politik. Selama tidak terjadi kemampuan delegasi hingga kontrol kekuasaan oleh masyarakat maka politik masih berada pada kondisi krisis.

Mengingat kondisi teraktual realitas kepemudaan, dampak hubungan ketiga penyakit partisipasi tersebut adalah realitas non-partisipasi pada bentuk tokenisme. Dalam arti apapun bentuk partisipasi pemuda, sulit untuk bertemu keberpengaruhannya terhadap dampak-dampak jangka panjang. Peneliti optimis bahwa penemuan kebenaran partikular tersebut menunjukkan realitas partisipasi pemuda. Pemuda pada konteks kala wacana tersebut adalah generasi *millennials*. Sehingga kita perlu sadari bahwa *millennial* sebagai konsituen politik paling potensial ternyata berada dalam status yang rentan. Tentu saja hal ini terjadi mengikuti karakter konstituen politik yang kebanyakan adalah generasi *millennials* yang tidak peduli terhadap merek. Seperti disampaikan oleh Diggles (2014) bahwa generasi ini bersikap pragmatis, sehingga tidak peduli solusi yang mereka harapkan dilakukan oleh atau melalui partai manapun—pada konteks politik Amerika Serikat yakni Demokrat dan Republik. Terlebih tidak mengherankan bila sindrom mesianik begitu kuat terjadi pada masa sekarang. Bila kondisi

ini dipertahankan dan dianggap sebagai kondisi partisipatif yang relative ideal maka akan agak kesulitan untuk menuju level partisipasi *delegated power*. Meskipun secara kuantitas dan partisipasi mereka dianggap berpotensi membangun *citizen control*. Apabila mentalitas pemuda tidak dipersiapkan untuk mengambil tanggung jawab publik dan memegang jabatan-jabatan publik tertentu, terutama keterlibatan dalam perjuangan menuju bangku parlemen, efektifitas politik sebagai tujuan akhir partisipasi kewarganegaraan hanya akan terjebak pada kondisi hegemonik tertentu, yang pada kenyataannya hanya menjalankan politik berdasarkan cara pandang ekonomistik dan marketing. Berbeda hal ketika kesadaran politik dan rasa tanggungjawab untuk terlibat dalam dinamisme politik terbangun. Pemuda yang mulai bersentuhan dengan dinamisme politik dan mempersiapkan diri untuk mewakili suara masyarakat, diharapkan akan memahami kondisi-kondisi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi.

Kondisi hegemonik diakui terjadi dan cenderung berpihak kepada kelompok tertentu. Seperti simbolisme ‘kreatif’ yang tidak hanya merujuk pada etos yang dikandung wacana, terlebih adalah simbolisasi kredo ideologis. Kata dengan makna denotatif dan kebaikannya diterima secara universal telah mampu dibuktikan kedalam berbagai prestasi dan

prodak partisipasi kewarganegaraan lainnya. Maka akan sulit untuk menggugat langsung simbolisme tersebut. Bila pun diduga sebagai mekanisme kooptasi dan marginalisasi kelompok kritik. Hal ini disebabkan pada *field* politik dan kepemimpinan, kelompok kritik tidak memiliki modal simbolik yang cukup. Setidaknya dilakukan upaya untuk mengakses jalur kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok komunitas yang tergabung dalam BYF. Kelompok komunitas yang tidak terinstitusi melakukan upaya akses kebijakan melalui pendekatan berkelanjutan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, setidaknya memberikan jalan partisipatif yang strategis untuk memperjuangkan hak-hak sebagai kelompok masyarakat kota Bandung. Dengan cara tersebut pemuda dapat mengakses anggaran publik untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan idealisme pemuda. Upaya tersebut serta respon positif dari pihak pemerintah pun membuka jalan sinergitas partisipasi masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Secara langsung hal tersebut berada pada level partisipasi kewarganegaraan pemanfaatan anggaran publik untuk kepentingan publik.

Adapun kekhawatiran kelompok kritik lebih jauh pada kecenderungan sistem yang tidak berpihak kepada kebenaran partikular yang dipercayai. Maka jalan yang paling

mungkin bagi kelompok kritik adalah merebut bangku parlemen. Hemat peneliti, upaya ini merupakan partisipasi kewarganegaraan paling substantive untuk memperjuangkan keyakinan kelompok tertentu. Dengan keberadaan kelompok kritik pada lembaga legislatif, ketidakadilan, prasangka keberpihakan, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya dapat dipantau dan dikendalikan secara *legitimate*. Peneliti beranggapan bahwa partisipasi kewarganegaraan berupa keterlibatan pada dinamisme politik sangat diperlukan. Mengingat realitas yang ditunjukkan dalam dinamisme interdiskursif Bandung Juara—bahkan wacana politik lainnya di berbagai tingkatan—cenderung berkesan bahwa juru selamat semata-mata hadir sebagai eksekutif (presiden, gubernur, dan walikota/bupati). Pemuda sebagai kelompok dominan harus mewacanakan keterlibatan sosial-politik untuk kemudian mengisi posisi legislatif. Bila pemuda hanya mewacanakan kesukarelaan dan terbuai dengan kebaikan semu demikian, mereka hanya akan berposisi sebagai objek dominasi dan digiring kepada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Seperti yang terjadi kepada kelompok volunteer Kita Indonesia sebagaimana dijelaskan RI dalam sesi wawancara. Kelompok komunitas maupun organisasi kemasyarakatan pemuda pada era demokrasi sosial sangat berpeluang untuk

mengakses posisi strategis tersebut. Terutama era yang mendukung keterbukaan dan keterhubungan yang luas melalui perkembangan kapabilitas media sangat memungkinkan kelompok muda untuk terjun mengambil peran dalam dinamisme politik. Asalkan dibangun wacana ancaman yang menyuarakan urgensi dari keterlibatan politik untuk meraih kursi legislative. Sasarannya adalah penghapusan stigma depolitisasi, deparpolisasi, dan deideologisasi, guna membangun kesadaran warga negara yang komprehensif, memahami berbagai sendi demokrasi sosial dan dinamisme politik.

Seperti disampaikan oleh Driskell dan Neema (2009) strukturisasi partisipasi kewarganegaraannya menyatakan apabila pemuda menunjukkan tanda-tanda partisipasi berupa interaksi dan kolaborasi yang tinggi akan tetapi tidak nampak peningkatan kemampuan pemuda untuk membuat keputusan dan mempengaruhi perubahan maka pemuda cenderung berada pada posisi non-partisipasi. Peneliti menempatkan partisipasi kewarganegaraan pemuda kota Bandung pada kondisi tokenism berdasarkan penyakit partisipasi yang teridentifikasi. Menurut dimensi partisipasi Driskell dan Neema, bila dorongan partisipasi saja yang dikedepankan maka kondisi tokenism kemungkinan akan berubah jadi bentuk mobilisasi. Namun bila

dibangun upaya dan ruang partisipasi yang memungkinkan pemuda untuk memegang tanggungjawab atau jabatan, maka pemuda dapat dikatakan berada kondisi partisipasi. Dengan adanya ruang tersebut maka bentuk hegemonik apapun, dengan kapabilitas sebagaimana ditunjukkan wacana Bandung Juara cenderung mewujudkan partisipasi yang mapan, dimana pemuda dan golongan masyarakat yang lainnya berpeluang dan berkemampuan untuk mengambil keputusan bersama sebagai bentuk puncak menurut terminologi dimensi partisipasi pemuda Driskell dan Nema. Sehingga aspek terpenting dalam mendorong partisipasi kewarganegaraan kota Bandung adalah memberi ruang partisipasi dimana terdapat tanggungjawab sosial dan kewarganegaraan didalamnya. Seperti OKP yang selama ini kita pertahankan melalui KNPI. Sebaliknya perlu pendekatan terhadap aktifitas komunitas yang posisinya dianggap rentan karena cenderung tidak terikat tanggung jawab dan tidak melalui pola pendidikan kader yang jelas.

KESIMPULAN

Etos kolaborasi yang mengandaikan konsensus keterlibatan pemuda bersama unsur pemerintah, pengusaha, kaum Intelektual, dan masyarakat secara umum, untuk mewujudkan kultur masyarakat madani atau *civil society* yang menjalankan proses demokratisasi dari

hulu hingga ke hilir, dari tataran kekuasaan hingga pemberdayaan pada tataran akar rumput, nyatanya tidak didukung oleh kondisi dan situasi politis pada tubuh kepemimpinan kota Bandung. Meskipun pewacana (Bandung Juara) telah melakukan upaya rekonstruksi secara halus menggunakan gaya eufimisasi dan litotes untuk menghindari kesan kekuasaan atau kesan politik yang superior; identifikasi dengan strategi pembenaran mengenai kultur pemuda yang kompak, pengalaman mental, sejarah, serta emosional konstituen; yang menunjukkan cara kerja diskursus Bandung Juara merubah persepsi konstituen kearah tujuan hegemoni secara gradual ternyata tidak berbuah praktek sosial partisipasi kewarganegaraan yang diharapkan berada pada level *citizen power*.

Penyebabnya adalah *political struggle* pada realitas kepemimpinan kota Bandung; dimana pemuda kota Bandung bersama keragaman model hubungan *civil society* terhadap kekuasaan menunjukkan terjadinya perebutan akses kekuasaan antara kelompok OKP dan komunitas diteruskan dengan perebutan diantara subordinasi keduanya; dimana pada skala populis teridentifikasi entitas yang menunjukkan pertarungan simbolik antara penanda ‘kritik’ dan ‘kreatif’ yang didasarkan perbedaan pemahaman diantara keduanya. Kedua bentuk *political struggle*

tersebut terjadi pada satu *field* dan aktor yang hidup diantara komunitas dengan penyakit partisipasi yang meradang seperti: 1) *Placation syndrome*, dimana kelompok pemuda sulit berdampingan dengan situs yang berbeda paham dan golongan karena kecenderungan tingginya ego simbolik. Sindrom ini berakibat pada sikap enggan memulai inisiatif kerjasama karena merasa tidak berada pada kondisi yang berdamai; 2) Sindrom mesianik, dimana perhatian pemuda kepada suprastruktur politik diluar eksekutif luput dari cakrawala pandang pemuda. Hal ini pun disebabkan oleh dominasi wacana eksekutif dan minimnya interaksi publik dari pemangku legislatif; 3) Atrofi Politik, dimana politik ditempatkan hanya pada skala perebutan kekuasaan dan pemuda mengalienasi kegiatan partisipasinya dari dinamika politik dengan menyebutnya sebagai kegiatan non-politik. Hal ini menempatkan realitas pada kondisi krisis politik di kalangan pemuda kota Bandung. Sehingga temuan tersebut menunjukkan bahwa konformitas yang dilakukan pemuda terhadap etos kolaborasi berada pada level tokenisme yang tergolong pada realitas non-partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry (1969) A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, vol. 35, no. 4, pp. 216–24.
- Barnes, S. H., Kaase, M., Allerbeck, K. R., Farah, B. G., Heuks, F., Inglehart, R., Jennings, M. K., Klingemann, H. D., Marsh, A., & Rosenmayr, L. (1979). *Political Action*. Beverly Hills, Calif: Sage.
- Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loic J. D. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The Chicago of University Press.
- Burn, S. M., & Konrad, A. M. (1987). *Political Participation: A matter of community, stress, job autonomy, and contact by political organizations*. *Polit. Psychol.* Vol. 8, p125-138.
- Carruthers, Peter & Jill Boucher. (1998). *Language and Thought: Interdisciplinary Theme*. Cambridge Univ.
- Diggles, Michelle. (2014). *Millennials – Political Explorers*. Washington, D.C.: Third Way.
- Driskell, David & Neema, Kudva (2009) *Creating Space for Participation: The Role of Organizational Practice in Structuring Youth Participation*. *Community Development*, vol. 40, no. 4, p367–380.
- Eldridge, P. (1995). *Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia*. New York: Oxford University Press
- Fisher, Julie. (1998). *Nongovernments: NGOs and the Political Development of the Third World*. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). *A cognitive process theory of writing*. *College Composition and Communication*, 32, 365-387.
- Gelb, J. (1952). *A Study of Writing*. The Foundation of Grammatology.
- Gramsci, A. (1971) *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Habermas, Jürgen. (1963). *Theory and Practice*. London: Heineman.
- Heubner, R. B., & Lipsey, M. W. (1981). *The Relationship of three measures of locus of control to environmental activism*. *Basic Appl. Social Psychol.* Vol. 2, p 45-58.
- International Association for Public Participation*. (2007). *Spectrum of Public Participation*. [online] diakses melalui <http://www.iap2.org/associations/4748/files/spectrum.pdf>. Pada 30 Mei 2016

- Iqbal, Muhammad. (2016). *Ridwan Kamil for Mayor: A studi of a political figure on twitter*. Master Thesis, Departement of Media Studies, Stockholm University.
- Kaid, Lynda Lee. (2015). *Handbook Penelitian Komunikasi Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Kamil, Ridwan. (2013). *#TETOT: Aku, Kamu, dan Media Sosial*. Bandung: Sygma.
- Marsh, A. (1977). *Protest and Political Consciousness*. Beverly Hills, Calif: Sage
- McCharly, Thomas. (2011). *Metodologi Teori Kritis Jürgen Habermas*. Kreasi Wacana: Bantul.
Alih bahasa oleh Nurhadi dari, McCharthy, Thomas. (1982). *The Critical Theory of Jürgen Habermas*. MIT Press: Massachusetts.
- Milbrath, L. W. (1986). *Environmental Beliefs and Values*. Dalam Herman, M. G. (ed.). *Political Psychology*. Sanfrancisco: Jossey-Bass, p97-138.
- Ricento, Thomas. (2003). The discursive construction of Americanism. SAGE Publications: *Discourse & Society*. Vol 14(5): 611–637
- Riker, J.V. (1995). *Contending Perspectives for Interpreting Government-NGO Relations in South and Southeast Asia*. dalam N. Heyzer, J. Riker, & A. Quizon (ed.) *Government-NGO Relations in Asia: Perospect and Challenges for People-Centered Development*. Basingstoke: Macmillan.
- Riker, J.V. (1998). *The State, Institutional Pluralism, and Development from Below: The Changing Political Parameters of State-NGO Relations in Indonesia*. (Disertasi Ph.D). Ithaca: Cornell University
- Schmitter, Philippe C. (2001). Perkembangan Mutakhir dalam Studi Akademis Demokratisasi: Pelajaran bagi Indonesia dari ‘Transitologi’ dan ‘Konsolidologi’. *Jurnal Demokrasi dan Ham* (the Habibie Center, Jakarta). Vol. 1(3)
- Sears, David O. (1986). *College Sophomores in the Laboratory: Influences of a Narrow Data Base on Social Psychology's View of Human Nature*. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 51, No. 3, p515-530
- Torney-Purta, J., & Vermeer, S. (2004). *Developing Citizenship Competencies from Kindergarten through Grade 12: A Background Paper for Policy Makers and Educators*. Denver: Education Commission of the States.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. & Schulz, W. (2001). *Citizenship and Education in Twenty Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*. Amsterdam: IEA.

- van Dijk, Teun. A. (2008). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan
- Wantanabe, P.Y. & Milburn, M.A. (1988). *Activism against Armageddon: Some predictors of nuclear-related political behavior*. *Political Psychology*, 1988, 9, 459-470.
- Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M. and Liebhart, K. (1999) *The Discursive Construction of National Identity* (trans A. Hirsch and R. Mitten). Edinburgh: Edinburgh University Press